

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Jawa Tengah sebelah Selatan, yang dipandang sebagai pulau terpadat penduduknya di Indonesia. Yogyakarta disebut Daerah Istimewa dalam Republik Indonesia karena pada mulanya merupakan daerah berpemerintahan sendiri pada zaman pendudukan Belanda dan Jepang. Penduduk Yogyakarta termasuk dalam kelompok etnis Jawa.<sup>1</sup> Suku Jawa terdiri dari beberapa etnis, salah satunya etnis Cina. Komunitas Cina sudah bisa dijumpai pada awal abad 14 di Jawa. Ini artinya, Cina bukanlah etnis baru untuk Jawa dan etnis pendatang untuk bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Jumlah orang Cina di Yogyakarta tahun 1906 – 1910 ada 5.266 atau 6,61 % dari jumlah seluruh penduduk Yogyakarta sebesar 79.567 jiwa. Selanjutnya pada tahun 1920 jumlah orang Cina di Yogyakarta meningkat sebesar 7.250 jiwa. Pada sensus tahun 1930, warga Cina di Yogyakarta mencapai 12.637. Dari 9.189 jiwa mereka tinggal di kota dengan jumlah

---

<sup>1</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. 15.

<sup>2</sup> Agus Gunawan Satyaputra, *Misi di Tengah Etnis Tionghoa Indonesia: Suatu Perspektif Sejarah*, *Teologi Stulos*, 2004, Vol. I No, 3, hlm. 83.

laki-laki sebesar 4.998 dan 4.191 untuk perempuan, sisanya tersebar di luar kota. Pada bulan Januari 1952 ada 8, 297 orang Cina di Yogyakarta.<sup>3</sup>

Keadaan Kota Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran di berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial. Tindakan pemerintah Jepang sangat kejam ditambah dengan kurangnya bahan makanan, pakaian dan barang-barang lainnya selama perang menimbulkan ketidak puasan yang meluas di semua kalangan penduduk terutama rakyat jelata.<sup>4</sup>

Pengertian pribumi adalah asli dan non pribumi adalah pendatang. Kalau pribumi dimengerti sebagai keaslian, susah sekali untuk mendeteksi ukuran keaslian. Apakah seorang yang lahir di Yogyakarta (Jawa) baik rakyat, priayi atau keturunan raja adalah sungguh-sungguh asli tanpa ada darah campuran sejak awal mula. Padahal setiap orang akan datang dari suatu tempat dan berpindah dari tempat yang lain.<sup>5</sup> Orang Cina selalu dianggap sebagai non pribumi, padahal nenek moyang mereka sudah lama tinggal dan berbaur dengan orang Jawa.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*, Djakarta: Kementerian Penerangan, 1953, hlm. 145

<sup>4</sup> Selo Soemardjan, *op.cit.*, hlm 45.

<sup>5</sup> Ons Untoro. (2000). Cina, Jawa dan Pribumi, *Tembi*, Vol. 1 No, 2, hlm. 3.

<sup>6</sup> Taufik H. Mihardja, Menjembatani Pribumi dan non Pribumi, *Kompas*, 16 Agustus 1991, hlm. 2, kolom 4.

Diskriminasi terhadap komunitas Cina merupakan warisan sejarah masa lampau ketika Belanda menerapkan politik *divide et impera*. Politik memecah belah Belanda yang dilakukan dengan cara membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan: Eropa, Timur asing seperti Cina, India, dan Arab, dan Pribumi. Di antara ketiga golongan ini, pribumilah yang paling jauh ketinggalan, baik secara ekonomi maupun sosial.<sup>7</sup> Perbedaan tersebut digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengadu domba dengan menggambarkan seolah-olah pribumi itu, tidak jujur, bodoh, selalu memusuhi orang Cina. Sebaliknya orang Cina digambarkan sebagai suatu komunitas yang licik, kikir, dan serigala ekonomi. Politik ini membuat timbulnya kebencian yang mendalam dari golongan pribumi terhadap komunitas Cina.<sup>8</sup>

Orang pribumi awalnya memberikan kesempatan kepada orang Cina, untuk lebih bergerak dan memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi. Akibatnya orang Cina memegang status sosial ekonomi lebih tinggi dari pada penduduk pribumi. Kebanyakan kehidupan orang pribumi masih dalam tingkat hidup prihatin, jauh seperti yang dirasakan oleh orang keturunan Cina. Orang pribumi merasa tidak senang terhadap orang Cina

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Drs. Ma'ruf Siregar. Pada tanggal 6 Oktober 2011, pukul 18. 35. Di warung kelontong (Cokrokusuman Baru, Jetis 2/999, Yogyakarta).

<sup>8</sup> Frans H. Winarta. (2004). Diskriminasi Tionghoa, Jangan Berulang Kesalahan yang Sama, *Tempo*, No. 25 Tahun XXXIII, hlm. 58.

yang hidup mewah, bersikap angkuh, dan kurang merasa simpati terhadap orang pribumi. Orang Cina menganggap orang pribumi remeh dan rendah.<sup>9</sup>

Pasca Indonesia merdeka belum ada kebijakan resmi menyangkut kewarganegaraan Indonesia. Pada bulan September 1946, Wakil Presiden Hatta meyakinkan orang Cina lokal bahwa Cina yang warga negara akan mendapatkan kedudukan dan hak yang sama dengan orang pribumi.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia memastikan tempat kelahiran sebagai patokan penentuan status kewarganegaraan Indonesia. Tapi Presiden Cina Daratan, Choe En-lai, pada 1955 menetapkan Republik Rakyat Cina menganut sistem kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Chou En-lai mengklaim semua etnis Cina di seluruh dunia sebagai warga negara Republik Rakyat Cina. Untuk keturunan Cina di Indonesia, Chou En-lai membujuk Presiden Sukarno agar membuat perjanjian bilateral. Bersamaan dengan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, Indonesia dan Cina membuat perjanjian Dwi Kewarganegaraan bagi keturunan Cina di Indonesia.<sup>11</sup>

Pengusaha Cina menjadi satu-satunya sumber kredit bagi para pengusaha pribumi, saat Indonesia dilanda krisis moneter. Selama revolusi fisik, di daerah-daerah pendudukan Belanda, orang Cina tetap menjalankan

---

<sup>9</sup> Hidajat. Z.M, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977, hlm. 112.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>11</sup> Daru Priyambodo, dkk. (2004). Sisa Diskriminasi di Mana-Mana, *Tempo*, No. 25 Tahun XXXIII, hlm. 52.

perdagangan dan mendapat kepercayaan serta monopoli dari Belanda. Belanda meninggalkan Indonesia tahun 1950, kekosongan perdagangan di daerah-daerah dengan cepat diisi orang Cina, sehingga dengan demikian orang Cina makin menguasai kehidupan ekonomi perdagangan. Sebagian besar orang Cina menguasai perusahaan besar, perantara, perusahaan kecil, dan pengecer.<sup>12</sup>

Pemerintah mulai melakukan pembatasan-pembatasan usaha kepada orang-orang Cina, khususnya bagi mereka yang masih Warga Negara Asing. Pembatasan ini berlaku dengan adanya Program Benteng tahun 1950 yang diprakarsai Sumitro Djojohadikusumo. Program ini dimaksudkan membentuk pengusaha pribumi yang kuat ternyata mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena tumbuh dan smaraknya “kolusi” di antara pengusaha Cina dengan penguasa melalui partai-partai politik. Untuk mendapatkan izin beroperasinya perusahaan dagang begitu mudah meskipun harus melalui lobi-lobi.

Masalah yang dihadapi komunitas Cina di Yogyakarta semakin sulit ketika pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 1959 yang mengusir keluar orang Cina dari pedesaan dan kecamatan menuju perkotaan. Kegiatan dagang orang Cina hanya boleh dilakukan dalam ibukota pemerintah daerah. Kebijakan ini mengakibatkan puluhan ribu orang Cina terpaksa

---

<sup>12</sup> Ons Untoro. (2000). Jejak Langkah Cina di Jawa, *Tembi*, Vol. I No, 2, hlm. 5.

kembali ke daratan Tiongkok ketimbang menanggung beban kesulitan di tempat tinggal yang baru.<sup>13</sup>

Pembahasan tentang Komunitas Cina di Yogyakarta pada masa pasca kemerdekaan ini menarik untuk dikaji, batas waktu penelitian ini adalah antara tahun 1946 sampai tahun 1960. Tahun 1946, Hatta mengeluarkan pernyataan tegas mengenai permodalan dan posisi ekonomi Cina, pada konferensi masyarakat Cina di Yogyakarta dan merupakan awal tahun dikeluarkan UU kewarganegaraan untuk WNA setelah pasca kemerdekaan, sedangkan tahun 1960 merupakan batas akhir penutupan toko-toko pengecer di desa-desa akibat PP. No. 10 tahun 1959. Adapun batasan wilayah geografis yang menjadi patokan penelitian ini adalah kota Yogyakarta. Pemilihan kota Yogyakarta didasarkan pada pertimbangan bahwa Komunitas Cina di daerah ini relatif kecil tingkat konflik dalam masyarakatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang makalah diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi masyarakat Yogyakarta dan eksistensi Cina pada masa pendudukan Jepang?
2. Bagaimana status kewarganegaraan Komunitas Cina di Yogyakarta pada tahun 1946-1960?

---

<sup>13</sup> Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 86-87.

3. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi komunitas Cina di Yogyakarta Pasca Kemerdekaan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

- a. Melatih daya pikir yang kritis, analitis, sistematis, dan objektif serta peka terhadap fenomena yang terjadi dimasa lampau.
- b. Melatih penyusunan sebuah karya sejarah dalam rangka mempraktikkan metodologi sejarah yang kritis.
- c. Menambah perbendaharaan karya sejarah, khususnya mengenai sejarah Indonesia.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Menjelaskan kondisi masyarakat Yogyakarta dan eksistensi komunitas Cina di Yogyakarta..
- b. Menganalisis status kewarganegaraan Komunitas Cina di Yogyakarta pada tahun 1946-1960.
- c. Mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi Cina pasca kemerdekaan di Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Pembaca

- a. Dengan membaca skripsi ini diharapkan pembaca mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas mengenai keadaan kehidupan komunitas Cina pada masa pasca kemerdekaan di Yogyakarta.
- b. Memperluas wawasan kesejarahan terutama yang terkait dengan Sejarah Indonesia khususnya sejarah mengenai Kondisi kehidupan sosial ekonomi komunitas Cina di Yogyakarta.
- c. Dengan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

### 2. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi penulis untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah, serta menyajikannya dalam suatu karya ilmiah yang objektif.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literature yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Penelitian bisa hanya menggunakan kajian pustaka atau kajian teori atau menggunakan keduanya.<sup>14</sup> Melalui kajian pustaka inilah penulis mendapatkan pustaka-pustaka atau literatur yang akan digunakan dalam penelitian sejarah.

---

<sup>14</sup> Daliman, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006, hlm. 3.



Pada masa pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia dari tahun 1942-1945. Jepang membuat peraturan mengenai pemerintahan Jepang yang ditujukan kepada kepentingan dan usaha perang. Tujuannya untuk menanamkan kekuasaan dan mempertahankan penjajahan Jepang di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Hal ini membuat masyarakat Yogyakarta mengalami kemunduran dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan.

Bidang pendidikan, sekolah-sekolah buatan Belanda dibubarkan dan bagi masyarakat Cina didirikan satu sekolah khusus.<sup>15</sup> Bidang sosial, keadaan di daerah Yogyakarta sangat menyedihkan. Daerah-daerah membentuk Panitia Penyerahan Romusha (PPR) yang berkewajiban untuk menyerahkan tenaga romusha berdasarkan laporan sementara atau daftar sementara. Bidang ekonomi, banyak terjadi perampokan-perampokan yang dilakukan oleh penduduk. Keadaan ini menimbulkan kekacauan di lapangan ekonomi.<sup>16</sup>

Buku yang berjudul “*Sejarah Daerah istimewa Yogyakarta*”, ditulis oleh Masjkuri dkk, diterbitkan oleh Depdikbud, Jakarta pada tahun 1977. Buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu literatur yang cukup komprehensif dengan konsep penyajian yang menarik, tulisan ini memberikan gambaran umum tentang Sejarah Daerah istimewa Yogyakarta terutama pada masa kolonial Belanda sampai jaman kemerdekaan, sehingga

---

<sup>15</sup> Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>16</sup> Masjkuri & Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Depdikbud, 1997, hlm. 45.

dapat mengetahui bagaimana keadaan Yogyakarta pada waktu itu baik dari segi pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Pada masa kolonial sampai awal kemerdekaan identitas orang Cina ditentukan oleh Totok atau Peranakan maka pada masa pasca kemerdekaan identitas tersebut ditambah dengan istilah Cina Warga Negara Asing dan Cina Warga Negara Indonesia keturunan. Status kewarganegaraan tersebut harus mereka pilih agar tidak terjadi kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan. Oleh karena itu Badan Pekerja KNIP mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan dan Penduduk Indonesia pada tanggal 10 April 1946 yang disebut UU No.3/1946. Undang-undang ini menganut sistem pasif, artinya bagi orang-orang keturunan asing, termasuk orang-orang keturunan Cina, yang secara tidak aktif melakukan penolakannya terhadap kewarganegaraan Indonesia dianggap telah memilih kewarganegaraan Indonesia.

Pemerintah memberikan kesempatan satu tahun untuk berfikir, yaitu sejak dikeluarkannya UU ini pada 10 April 1946 sampai 1 April 1947. Kesempatan berfikir ini diperpanjang sampai 1951 berdasar hasil keputusan KMB. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih lama untuk berfikir. Dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 ditandatangani perjanjian Dwikewarganegaraan, sehingga tidak akan ada lagi orang Cina yang memegang kewarganegaraan Cina sekaligus kewarganegaraan Indonesia. Meskipun sebagian besar dari orang Cina memilih kewarganegaraan Indonesia, mereka tetap dianggap sebagai WNI

keturunan asing. Masalah ini terselesaikan tahun 1960 dengan ditandatanganinya persetujuan tentang kewarganegaraan ganda antara Jakarta dan Peking.<sup>17</sup>

Timbul masalah kewarganegaraan dikalangan masyarakat Cina. Menteri Luar Negeri Sunario, seorang tokoh PNI pada Agustus 1953, mendesak pemerintah agar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan baru yang aktif untuk menggantikan UU Kewarganegaraan tahun 1946 dan hasil perjanjian KMB yang pasif. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia dalam RUU tersebut dipersulit.

Akibat munculnya RUU Kewarganegaraan Indonesia, timbul rasa khawatir di kalangan masyarakat peranakan Cina. PDTI<sup>18</sup> memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi massa yang mendapat dukungan luas masyarakat Cina di Indonesia. Untuk mewujudkan pembentukan organisasi tersebut PDTI menghubungi semua organisasi yang bernaung Cina. Oei Tjoe Tat menegaskan bahwa organisasi yang akan dibentuk adalah sebuah organisasi massa dan bukan partai politik dengan nama Baperwatt. Namun, setelah dilakukan kompromi maka secara bulat diputuskan bahwa organisasi baru tersebut bernama Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia disingkat Baperki.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> PDTI adalah Partai Demokrasi Tionghoa Indonesia, yang dipimpin oleh Thio Thiam Tjong. Lihat Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Elkasa, 2003, hlm. 722.

Tujuan utama Baperki adalah sebagai berikut.<sup>19</sup>

1. Memperjuangkan perwujudan cita-cita nasional, dimana setiap orang menjadi warga negara Indonesia dalam arti sesungguhnya.
2. Memperjuangkan pelaksanaan prinsip demokrasi dan prinsip prikemanusiaan.
3. Memperjuangkan perwujudan persamaan hak dan kewajiban, perlakuan yang sama dan adil bagi warga negara, tanpa perbedaan yang didasari atas suku, kebudayaan, adat-istiadat, dan agama.

Buku yang berjudul "*Etnis Cina dan Pembangunan Bangsa*", ditulis oleh Leo Suryadinata, diterbitkan oleh LP3ES, Jakarta pada tahun 1999. Buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu literature, tulisan ini memberikan gambaran umum tentang status kewarganegaraan komunitas Cina yang menjadi masalah pada masa pasca kemerdekaan. Orang Cina harus memilih antara WNI dan WNA. Padahal banyak orang Cina yang sudah turun menurun tinggal dan berbaur dengan masyarakat pribumi di Yogyakarta, tetapi mereka masih dianggap Warga Negara Asing. Selain itu penulis juga menggunakan tulisan Benny G. Setiono dengan judul *Cina dalam Pusaran Politik* yang dapat dijadikan acuan dalam memahami pembentukan baperki yang dilakukan oleh gabungan organisasi-organisasi politik Cina. Buku ini juga menjelaskan tujuan pembentukan Baperki bagi masyarakat Cina.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 732.

Daerah Istimewa Yogyakarta harus menerima konsekuensi sosial ekonomi yang berat karena kedudukannya sebagai ibukota negara Republik Indonesia. Masa perang kemerdekaan dengan ekonomi darurat, kehidupan ekonomi dalam semua sektor berada di dalam pengendalian pemerintah. Peranan golongan swasta terdesak, namun demikian golongan ini tetap berusaha untuk memainkan peranannya di dalam usaha perekonomian negara. Barang-barang kebutuhan sehari-hari harganya setiap hari bertambah mahal. Di kota sering terjadi kelaparan. Untuk mengatasi kelaparan itu penduduk terpaksa makan daun-daunan dan buah-buahan mentah sekedar untuk mengganjal perut.<sup>20</sup>

Konferensi masyarakat Cina diselenggarakan di Yogyakarta antara 17-19 September 1946. Wakil Presiden Republik Indonesia, Hatta dalam konferensi ini mengeluarkan pernyataan tegas mengenai permodalan dan posisi ekonomi Cina di Indonesia. Golongan pribumi dianggap sebagai masyarakat yang tertindas dalam hal ekonomi dengan keberadaan komunitas Cina yang dianggap sebagai penguasa lahan ekonomi. Berbagai kebijakan diberlakukan demi pembatasan komunitas Cina dalam kegiatan perdagangan, antara lain: Program benteng, Peraturan wajib giling padi, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959.

---

<sup>20</sup> *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*, Djakarta: Kementerian Penerangan, 1953, hlm. 413

Program benteng adalah kebijaksanaan yang hanya memberikan lisensi impor kepada golongan pribumi. Program benteng tidak mencapai tujuannya untuk menciptakan kelas wiraswastawan pribumi yang tangguh. Faktor yang mengakibatkan kegagalan tersebut terletak pada kurangnya pengalaman pribumi Indonesia, kuatnya oposisi dari orang Cina, dan berlangsungnya inflasi terus-menerus memaksa pemerintah mengadakan penilaian kembali atas program tersebut.<sup>21</sup>

Peraturan wajib giling padi tahun 1954 bertujuan untuk mengalihkan pemilikan gilingan beras dari orang Cina kepada orang Indonesia pribumi. Pemerintah bermaksud menguasai perdagangan dan peredaran beras, pemerintah melarang penggilingan-penggilingan beras menggiling padi di luar pemerintah.<sup>22</sup>

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 merupakan peraturan yang berisi larangan bagi orang-orang asing untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman, yaitu di luar ibu kota daerah swatantra tingkat I dan tingkat II yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1960.<sup>23</sup> Walaupun PP. No.10 tahun 1959 ini hanya bertahan satu tahun, tetapi sempat membuat peranan

---

<sup>21</sup> Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 34.

<sup>22</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta: Garba Budaya, 1960, hlm. 75.

<sup>23</sup> Mulai Tanggal 16 November Dilarang Adanja perdagangan Kecil asing di ibu kota swatantra I, II, dan Karesidenan. Peraturan Presiden No 10/1959 berlaku surut sampai 10-7-59, *Kedaulatan Rakyat*, 19 November 1959, hlm. 1, kolom 1.

Cina di Yogyakarta tak mampu memperkuat jaringan ekonominya. Akibat P.P.10 hubungan persahabatan antara pemerintah RI dan pemerintah RRT menjadi terganggu.

Buku yang di tulis P. Hariono dengan judul *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Diterbitkan oleh Sinar Harapan, Jakarta pada tahun 1993 dapat dijadikan acuan dalam memahami hubungan antara orang Cina dengan orang pribumi. Buku ini juga menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pedagang Cina, sehingga menimbulkan kecemburuan pedagang pribumi. Selain itu penulis juga menggunakan tulisan Twang Peck Yang dengan judul *Elite Bisnis Cina di Indonesia & dan masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950* yang dapat membantu penulis menjelaskan permodalan dan posisi Ekonomi Cina di Indonesia, serta usaha Cina dalam menghadapi kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah dalam membatasi perdagangan Cina.

#### **F. Historiografi yang Relevan**

Historiografi merupakan rekonstruksi masa lalu.<sup>24</sup> Oleh karena itu, sejarah sebagai masa lampau manusia merupakan lautan peristiwa yang secara logika tidak mungkin direkonstruksi secara utuh oleh masa kini. Sejarah yang ada pada masa kini adalah merupakan gambaran dari masa lampau yang ditulis oleh manusia masa kini. Dalam hal ini penggunaan

---

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Bentang Budaya, 2001 (cet. IV), hlm. 18.

metode sejarah sangat penting sebagai suatu cara untuk merekonstruksi masa lampau.

Historiografi juga merupakan suatu penyajian hasil rangkaian kerja dalam penelitian sejarah dalam bentuk tulisan (karangan) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Historiografi juga merupakan proses pengujian dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Historiografi dikatakan sebagai puncak dalam rangka kerja ilmiah sejarawan dengan metode sejarah. Historiografi ini bisa berupa buku sejarah, skripsi, tesis, disertasi, yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari historiografi yang relevan adalah untuk dapat membedakan karya sejarah yang akan ditulis dengan karya-karya sejarah yang telah ditulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan historiografi yang relevan sebagai berikut.

Ari Kurniawan dalam skripsinya yang berjudul "*Eksistensi Komunitas Cina Pada Masa Pendudukan Jepang di Yogyakarta (1942-1945)*" tahun 2011, Fakultas Ilmu Sosial, UNY. Skripsi ini membahas mengenai Eksistensi Cina Pada Masa Pendudukan Jepang di Yogyakarta. Selain itu skripsi karya Ari Kurniawan membahas peranan komunitas Cina dalam perekonomian, perlawanan orang Cina terhadap pendudukan Jepang, kondisi pendidikan komunitas Cina di Yogyakarta. Dalam Skripsi yang akan disusun juga membahas perdagangan komunitas Cina tetapi periodenya pada zaman pasca kemerdekaan. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang disusun karena skripsi yang disusun lebih memfokuskan



kondisi sosial ekonomi komunitas Cina periode pasca kemerdekaan di Yogyakarta serta isinyapun sangat berbeda.

Skripsi Yudi Prasetyo dengan judul “Ekonomi Perdagangan Orang Cina di Kota Yogyakarta 1907-1945”, Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Pembahasan dari Skripsi Yudi Prasetyo berisi tentang komunitas Cina pada masa kolonial dan perdagangan masyarakat Cina di Yogyakarta. Perbedaan dengan karya tulis yang penulis buat yaitu terdapat pada waktu, dan bahasanya. Penulis mengambil waktu pasca kemerdekaan khususnya tahun 1946-1960, pembahasannya tentang dampak perkembangan perdagangan Cina dengan adanya kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang membatasi gerak dagang Cina di Yogyakarta.

Berbagai karya tersebut akan menjadi sumber tambahan dalam penulisan skripsi yang berjudul *Komunitas Cina di Yogyakarta tahun 1946-1960: Studi Tentang Kondisi Sosial Ekonomi Cina di Yogyakarta*. Untuk menghindari terjadinya penjiplakan karya ilmiah, penulis mengambil pokok bahasan dimasing-masing karya ilmiah untuk dibahas secara mendalam lagi. Dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan tersebut akan memberikan nilai tambah dalam penyusunan skripsi ini.

## **G. Metode dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode sejarah menurut M. Natsir adalah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan serta

pengalaman masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Sedangkan menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Menurut Nugroho Notosusanto, metode sejarah mempunyai empat langkah kegiatan, yaitu.<sup>25</sup>

#### **a. Heuristik**

Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal sebagai data-data sejarah. Dalam melakukan kegiatan menghimpun jejak atau data-data sejarah, penulis berusaha mencari sumber-sumber yang relevan sebagai bahan kajian untuk menyusun skripsi ini. Penulis mencari sumber-sumber berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan tulisan hasil penelitian yang relevan dengan obyek penelitian. Heuristik diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.<sup>26</sup>

#### **1) Sumber Primer**

Menurut Louis Gottschalk, sumber primer adalah kesaksian dari seseorang saksi dengan mata kepala sendiri. Selain itu juga

---

<sup>25</sup> Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*, Jakarta: Dephankam, 1971, hlm. 35.

<sup>26</sup> I Gde Widja, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 1989, hlm. 18.

kesaksian menggunakan panca indera yang lain atau juga saksi dengan alat mekanis yang selanjutnya disebut saksi pandang mata.<sup>27</sup> Arti lain sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata.<sup>28</sup> Sumber primer dalam penulisan ini diantaranya adalah :

*Kedaulatan Rakyat*, 19 Agustus 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 10 September 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 18 September 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 23 September 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 05 November 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 19 November 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 21 November 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 24 November 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 25 November 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 16 Desember 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 24 Desember 1959

*Kedaulatan Rakyat*, 09 Januari 1960

## 2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata, yakni dari seorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan. Menurut Winarno

---

<sup>27</sup> Louis Gottschalk, “ *Understanding History* ”.a. b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 35.

<sup>28</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 96.

Surahmad sendiri mengatakan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang mengutip sumber lain. Jadi dikatakan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang kedua. Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan sumber sekunder sebagai berikut:

Benny G, Setiono. (2003) *Cina dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.

Masjkuri & Sutrisno kutoyo. (1997). *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Depdikbud.

Peter Carey. (1985). *Orang Jawa dan Masyarakat Cina*. Jakarta: Pustaka Azet.

Selo Soemardjan. (1990). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Twang Peck Yang. (2004). *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Niagara.

Yahya A. Muhaimin. (1991). *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi, Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

#### **b. Kritik Sumber (Verifikasi)**

Kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk menentukan apakah sumber atau data yang didapat valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara substansial maupun secara fisik. Dalam usaha mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, dan apa yang palsu, apa yang mungkin dan tidak mungkin. Apabila

semua sumber yang diperlukan sudah terkumpul, maka dilakukan kritik sumber terhadap sumber yang diambil.

Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat otentitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan.<sup>29</sup> Kritik sumber sendiri berarti usaha untuk menilai, menguji, serta menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan sumber yang autentik (asli).<sup>30</sup> Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern (*otentitas*) dan kritik intern (*kredibilitas*).

### 1) Kritik Intern

Kritik intern adalah kritik sumber yang digunakan untuk meneliti kebenaran isi dokumen atau tulisan tersebut. Kritik intern ini digunakan untuk menguji sejauh mana kredibilitas sumber yang telah terkumpul tersebut. Kritik intern ini lebih menekankan pada isi dari sebuah dokumen/sumber sejarah.

Contoh kritik sumber khususnya kritik intern yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “ Komunitas Cina di Yogyakarta tahun 1946-1960: Studi Tentang Kondisi Sosial Ekonomi Cina di Yogyakarta” adalah buku yang ditulis oleh Twang Peck Yang, yang berjudul *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi*

---

<sup>29</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 132.

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm 101.

Kemerdekaan 1940-1950, sebagai pembanding penulis juga melakukan kritik intern terhadap buku yang ditulis Hidajat. Z.M. yang berjudul Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia. Dari buku yang ditulis oleh Twang Peck Yang dengan Hidajat. Z.M. terdapat kesamaan informasi mengenai perdagangan Cina di Yogyakarta pada masa pasca kemerdekaan Indonesia.

## **2) Kritik Ekstern**

Kritik ekstern merupakan kritik yang dilakukan untuk menguji keaslian sumber. Kritik ekstern dilakukan dengan melihat aspek-aspek ekstrinsik dari sumber. Kritik ekstern sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa peneliti sejarah menggunakan sumber asli dan bukan rekayasa. Kritik ekstern dapat dilakukan dengan melihat apakah sumber tersebut sesuai dengan kebutuhan, merupakan sumber asli atau salinan, dan apakah terjadi penambahan atau perubahan pada sumber-sumber tersebut.

### **c. Interpretasi**

Interpretasi yaitu proses menafsirkan fakta sejarah yang telah ditemukan melalui proses kritik sumber sehingga akan terkumpul bagian-bagian yang akan menjadi fakta serumpun. Dalam kegiatan interpretasi penulis berusaha menganalisis sumber-sumber yang ada,

kemudian menyusun sumber-sumber tersebut dalam bentuk penulisan skripsi.

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektifitas. Sebagian itu benar, tetapi sebagian salah. Benar karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak dapat berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan keterangan dari mana data itu diperoleh. Itulah sebabnya, subjektifitas penulis sejarah diakui.<sup>31</sup>

#### **d. Historiografi**

Historiografi merupakan sebuah kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah, setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, penafsiran kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Aspek kronologis sangat penting dalam penulisan sejarah karena dapat mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu peristiwa sejarah.

Dalam tahap ini diperlukan suatu imajinasi historis yang baik sehingga fakta-fakta sejarah menjadi kajian utuh sistematis, serta komunikatif. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian, yaitu pengantar, isi dan kesimpulan. Tahap penyajian ini merupakan tahap akhir bagi penulis untuk menyajikan semua fakta kedalam bentuk tulisan skripsi.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 100-101.

#### e. Pendekatan Penelitian

Penulisan suatu karya sejarah tentunya juga diperlukan suatu pendekatan-pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, karena pada hakekatnya sebuah ilmu tidak dapat berdiri sendiri dan berkaitan dengan ilmu lain. Suatu peristiwa tidak terjadi hanya karena satu sebab saja, melainkan ada sebab lain yang mempengaruhinya. Peristiwa sejarah yang terjadi disebabkan faktor-faktor yang cukup kompleks.<sup>32</sup>

Proses merekonstruksi sejarah membutuhkan pendekatan multidimensional. Dengan ini dimaksudkan agar dalam penggambaran suatu peristiwa sejarah akan lebih menyeluruh dan mudah dipahami. Penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, yaitu dari segi kita memandang dimensi yang akan diperhatikan, unsur-unsur yang diungkapkan dan lain sebagainya. Suatu penelitian sejarah akan lebih sempurna apabila menggunakan pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional dimaksudkan supaya pengungkapannya lebih bulat dan tuntas serta terhindar dari subjektivitas.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Utama, 1982, hlm. 17.

<sup>33</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 63.



Pendekatan dari berbagai aspek diharapkan dapat menghasilkan karya tulis sejarah yang dikaitkan dengan masalah-masalah dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam pendekatan ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan penelitian. Penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah politik, sosiologis, dan ekonomis.

Pendekatan politik didefinisikan oleh Miriam Budiarjo adalah sebagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan sistem-sistem itu.<sup>34</sup> Politik mengandung konsep-konsep kekuasaan, kebijakan dan pembagian dari sumber-sumber yang ada. Dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk membatasi gerak perdagangan komunitas Cina di Yogyakarta agar pedagang pribumi tidak ketinggalan dan mampu bersaing dengan pedagang Cina.

Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang menerangkan perilaku sosial manusia. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menyoroti masalah dari segi sosial dari peristiwa yang dikaji yang berhubungan dengan golongan-golongan konflik yang berdasarkan kepentingan ideologis, dan menjelaskan perilaku

---

<sup>34</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 8.

manusia.<sup>35</sup> Pendekatan sosiologis dalam tulisan ini ditujukan untuk mengungkapkan jalinan hubungan sosial antara komunitas Cina dengan masyarakat pribumi.

Pendekatan ekonomi merupakan penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasi yang dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam keadaan ekonomi sehingga dapat dipastikan hukum dan kaidahnya.<sup>36</sup> Pendekatan ekonomi dalam hal ini menyangkup tentang peran ekonomi, terutama perdagangan Komunitas Cina di Yogyakarta yang mempengaruhi keadaan kehidupan penduduk Yogyakarta.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara ringkas. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode dan pendekatan penelitian serta sistematika pembahasan.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 20.

<sup>36</sup> Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Jakarta: Bhatara, 1996, hlm. 32.

## **BAB II. KEADAAN YOGYAKARTA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG**

Dalam bab ini dibahas mengenai keadaan kota Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang. Pembahasannya meliputi keadaan pendidikan, sosial, ekonomi, serta eksistensi komunitas Cina pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta.

## **BAB III. STATUS KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT CINA DI YOGYAKARTA**

Dalam bab ini dibahas dasar hukum kewarganegaraan Cina yang selalu dipermasalahkan dan pembentukan baperki yang bertujuan untuk memperjuangkan perwujudan persamaan hak dan kewajiban, perlakuan yang sama dan adil bagi warga negara tanpa perbedaan yang didasari suku, kebudayaan, adat-istiadat .

## **BAB IV. KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KOMUNITAS CINA DI YOGYAKARTA TAHUN 1946-1960**

Dalam bab ini dibahas mengenai kehidupan sosial ekonomi masyarakat Yogyakarta pada masa pasca kemerdekaan, hubungan pribumi dengan Cina dalam kehidupan sehari-hari, beberapa faktor yang membuat pedagang Cina sukses, serta kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi perdagangan Cina

## **BAB V. KESIMPULAN**

Bab ini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan penulis.